

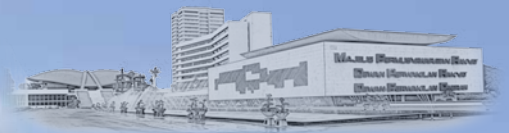


**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 820/VI/2014

III/JUNI 2014



## **Kebutuhan Kilang Sangat Mendesak**

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JUNI 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu kedua bulan Juni 2014 diisi dengan rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri. Dilaporkan pula tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hasil sidang *Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs-Asian Parliamentary Assembly (APA)* juga dilaporkan secara garis besar.

## Rapat Kerja Komisi I DPR

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 di ruang rapat komisi I DPR RI. Adapun agenda pada hari itu membahas tentang: (1). Perkembangan tentang ASEAN berkaitan dengan rencana aksi *ASEAN Community* tahun 2015, (2). Perkembangan masalah laut China Selatan, (3). Perkembangan hubungan bilateral RI-Australia, (4). Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Kemenlu TA 2015, (5). Peristiwa Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk oleh Pemerintah Malaysia dan (6). Perkembangan isu-isu multilateral, regional dan isu-isu luar negeri lainnya.

Kesimpulan rapat kerja; (1). Komisi I DPR RI menerima penjelasan Kemlu terkait Pagu indikatif Kemlu TA 2015 sebesar Rp. 5.454.119.000.000,- (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar sertatus sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya, komisi I DPR RI mendukung penguatan anggaran Kemlu ke depan, khususnya untuk peningkatan efektifitas kinerja kantor perwakilan RI di luar negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan penguatan pelaksanaan diplomasi publik, (2). Dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia, khususnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sengketa perbatasan RI dengan negara-negara tetangga yang masih tertunda, komisi I DPR RI mendesak Kemlu melakukan penguatan diplomasi dan percepatan proses penetapan perbatasan, (3). Mengingat tenggat waktu persiapan bagi penerapan komitmen RI sebagai bagian dari komunitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk turut dalam pembentukan *ASEAN Community 2015*, Komisi I DPR RI mendesak kepada Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri agar secara intensif meningkatkan sosialisasi tentang urgensi dan manfaat *ASEAN Community 2015* kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



## Tanggapan Menteri Keuangan atas Pandangan Fraksi-fraksi

Pemerintah RI mengucapkan terimakasih atas dukungan, pandangan dan saran semua Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2015 yang disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Mei 2014. Dokumen Kem dan PPKF tahun 2015 merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh pemerintah dalam menyikapi dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis, serta mendukung pencapaian sasaran dan target pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 yang bertemakan “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang diperkirakan sebesar 5,5-6,0 persen merupakan perkiraan yang realistis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai peluang dengan antisipasi potensi resiko baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia tahun 2015 diharapkan mampu menjadi faktor pendorong kinerja ekspor dan investasi Indonesia.

Dilihat dari sisi domestik, terjaganya stabilitas ekonomi makro, tingkat kepercayaan konsumen dan investor yang masih tinggi, serta berbagai upaya pemerintah dalam mendorong ekspor dan investasi, diharapkan akan mampu menstimulasi sektor riil dan tumbuhnya perekonomian nasional. Sekalipun demikian, perkiraan pertumbuhan ekonomi perlu realistis dengan memperhatikan resiko yang masih membayangi perekonomian global seperti gejolak pasar keuangan global terkait upaya normalisasi



kebijakan moneter di negara maju dan tidak tercapainya sasaran-sasaran perubahan struktural di negara maju. Sumber utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 adalah konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup tinggi yang di dorong oleh struktur demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif, meningkatnya kelompok berpendapatan menengah atas serta didukung oleh terjaganya stabilitas harga, perbaikan pendapatan per kapita masyarakat, serta program-program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, penguatan kinerja investasi domestik juga diharapkan akan menjadi penopang kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Penguatan tersebut terutama terkait dengan upaya-upaya perbaikan iklim usaha serta investasi di dalam negeri, program pembangunan infrastruktur (energi, transportasi, pelabuhan), perbaikan daftar negatif investasi, peningkatan belanja modal, penyebaran aktifitas investasi ke daerah yang lebih merata, serta penguatan peran swasta melalui skema *public-private partnership*. Kinerja ekspor pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami perbaikan. Perbaikan kinerja ekspor juga akan didukung oleh upaya diversifikasi pasar, peningkatan peran komoditas ekspor hasil olahan bernilai tambah tinggi, serta peluang lebih terbukanya pasar regional seiring dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Bank Indonesia sebagai langkah antisipasi. Penguatan kebijakan baik mikroprudensial maupun makroprudensial terhadap arus masuk modal asing juga diarahkan untuk mengurangi resiko pembalikan modal asing dan menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan Asia.

Terkait dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, pemerintah dan BI terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID). Dengan sinergi kebijakan tersebut, pengendalian inflasi diharapkan menjadi lebih efektif dan diarahkan untuk dapat mengatasi kendala struktural sumber tekanan inflasi, antara lain adanya *asymmetric information*, struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga yang cenderung oligopolistik, dan keterbatasan infrastruktur.

Sehubungan dengan pandangan terkait angka kemiskinan serta adanya kesenjangan ekonomi, pemerintah akan terus mengupayakan perluasan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pembangunan sumber daya manusia, yaitu peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatantaraf pendidikan. Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini telah diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh meningkatnya rasio gini, dimana pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,41 dari 0,37 pada 2009. Dapat kami sampaikan bahwa peningkatan rasio gini ini lebih didorong oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan menengah-tinggi yang lebih cepat dibandingkan pening-

katan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih besarnya akses masyarakat berpendapatan tinggi terhadap sumber-sumber pembiayaan, informasi, modal serta pengetahuan dan pendidikan.

Menanggapi pernyataan dari beberapa Fraksi terkait konsekuensi yang harus diperhitungkan pada APBN 2015 yang merupakan APBN pertama bagi pemerintahan baru, Pemerintah menyiapkan agar masa transisi dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam tahun 2015 yang disusun Pemerintah sebagai arah dalam penyusunan RAPBN 2015 adalah bersifat baseline yang substansinya diutamakan untuk mendukung kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah baru sesuai program-program kerja yang akan dilaksanakan. Sekalipun demikian, pemerintah telah menetapkan beberapa isu strategis di berbagai bidang yaitu politik, hukum, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

#### **Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs-APA**

Kegiatan sidang *Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs- APA* yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Juni 2014 merupakan tindak lanjut dari keputusan sidang pleno APA di Pakistan pada bulan 8-10 Desember 2013. Sidang yang dihadiri oleh 12 negara anggota APA, yaitu: Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, Sri Lanka, Bahrain, Yordania, Republik Islam Iran, Kamboja, Turki, Malaysia, Siprus, dan Republik Rakyat Tiongkok dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang tersebut menyampaikan perlunya keterlibatan parlemen secara aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui rencana dan langkah konkret yang bersifat akurat, efektif dan terukur, serta tidak memunculkan persoalan-persoalan baru, seperti dalam isu kerusakan lingkungan, polusi dan deforestasi. Melalui pertemuan APA tersebut, telah dihasilkan berbagai draft resolusi yang memberikan kekuatan baru dan pendekatan yang lebih efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai parlemen anggota APA yang telah lama dikenal aktif dalam organisasi APA, DPR RI melanjutkan tradisi prestatifnya dengan mengusulkan empat draft resolusi untuk dibahas, yaitu draft resolusi *integrated energy market in Asia*, draft resolusi *Alleviating Poverty in Asia*, draft resolusi *Environmental issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia*, dan draft resolusi *International Financial Affairs for the countries of APA Member Parliaments*. Keempat draft resolusi mendapatkan sambutan yang baik dan pembahasan yang serius dari berbagai peserta pertemuan APA tersebut. Diantara dinamika diskusi yang berkembang adalah keinginan untuk membentuk badan yang menangani *Asian Integrated Energy Market*, atau alternatif lainnya penyelenggaraan konferensi yang khusus

membahas *Asian Integrated Energy Market*. Di samping itu, diskusi juga membahas tentang kebutuhan regulasi terkait hal ini, dan kebutuhan infrastruktur yang menghubungkan konektivitas negara-negara di Asia.

Pembahasan keempat draft resolusi telah berlangsung sangat dinamis dan konstruktif. Draft resolusi mengenai *Financial Affairs for the Countries of APA Member Parliaments* mendapatkan banyak penguatan kepada kerjasama antar negara-negara APA untuk melakukan penguatan ekonomi nasional dan regional dari bahaya krisis ekonomi berikutnya, baik pada tingkat regional maupun global. Dalam draft resolusi *Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia*, fokus prioritas ditekankan agar masing-masing negara anggota APA dapat melaksanakan pendekatan pembangunan ber-

kelanjutan dalam paradigma pembangunan nasionalnya, sehingga bisa menghindari diri dari perubahan iklim, pemanasan global, degradasi dan deforestasi hutan.

Dalam draft resolusi *Alleviating Poverty in Asia*, semua partisipan menyepakati tentang perlunya keterlibatan aktif parlemen untuk turut menuntaskan kemiskinan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Dalam draft resolusi *Integrated Energy Market in Asia*, ditekankan perlunya mekanisme bersama melalui ide *Asian Integrated Energy Market*, yang akan dapat mengurangi resiko ketiadaan pasokan energi dalam konteks distribusi, penggunaan maupun preservasinya. Pada bagian akhir penutupan, semua peserta sidang menyambut baik penetapan keempat draft resolusi tersebut untuk dibawa, dibahas dan ditetapkan di dalam sidang pleno ke-7 APA di Kamboja mendatang. \*\*\*

## Kebutuhan Kilang Sangat Mendesak

Penambahan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak di tengah meningkatnya konsumsi dan makin tingginya ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah diminta segera merealisasikan proyek itu guna mengurangi impor produk BBM.

“Kilang minyak harus segera direalisasikan. Ini salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor produk BBM di dalam negeri,” kata Anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan (Fraksi Partai Demokrat) kepada Parlemen usai memimpin kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan (UP) V Balikpapan, di Provinsi Kalimantan Timur, akhir pekan lalu.

Dari data yang ada, kapasitas kilang Pertamina stagnan. Terakhir yang dibangun adalah Kilang Balongan pada tahun 1994. Sampai saat ini, hanya satu juta barel per hari minyak mentah yang bisa diolah di dalam negeri.

Menurut Milton, pada saat itu kebutuhan BBM belum meningkat, jumlah penduduk juga belum meningkat, peran otonomi daerah juga belum ada. “Tapi sekarang sudah beda, kebutuhan semakin lama semakin meningkat.



Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan saat memimpin kunjungan spesifik ke kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan (UP) V Balikpapan.

Kapasitas yang ada saat ini belum mencukupi, kita hanya punya stok 15 hari. Coba bayangkan kalau ada masalah nasional atau kebutuhan nasional yang tinggi seperti Pemilu, Lebaran, Natalan, itu sangat riskan sekali,” ujarnya.

Milton menambahkan, pemerintah ke depan harus serius memperhatikan *buffer stock* untuk ketahanan energi nasional, tidak bisa mengandalkan kinerja Pertamina. Sebab, Pertamina saat ini adalah *Public Service Obligation* (PSO) yang mensuplai 50 juta kilo liter subsidi BBM ke seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, kalau mengandalkan Pertamina untuk membikin kilang baru, hal itu tidak akan mungkin terwujud. Sebab, Pertamina terikat UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, di samping itu Pertamina juga terikat dengan UU BUMN, yang mensyaratkan bahwa sebagai Persero, Pertamina harus untung.

“Kalau buat kilang kan marginnya rendah, Pertamina bisa rugi. Kalau rugi, UU Tipikor mengatakan Persero bisa diajukan pidana, itu juga menjadi ketakutan dalam mengambil kebijakan

soal pembangunan kilang. Oleh karenanya pemerintah yang harus melakukan ini,” katanya.

Untuk itu, lanjut Milton, kilang minyak dan *buffer stock* BBM harus menjadi basis infrastruktur bukan bisnis. “Penekanannya lebih pada infrastruktur bukan bisnis, untuk itu pemerintah melalui APBN yang bisa mendorong realisasi ini,” jelasnya.

Menurut dia, sudah hampir 19 tahun, tidak ada kilang baru. Pembangunan kilang, kata Milton, hanya ada di era pemerintahan Soeharto. “Tidak ada lagi pembangunan kilang baru sejak pemerintahan Habibie sampai era Presiden

SBY saat ini. Karena memang peraturan perundang-undangannya yang beda. Kalau dulu zaman Pak Harto kan ada UU No 8 Tahun 71 tentang Perusahaan Negara. Sehingga Pertamina punya kuasa, punya kedaulatan. Sekarang kan tidak bisa. Pertamina tidak bisa representasi sebagai negara, dia (Pertamina-red) adalah Persero yang ‘bermain’ bisnis pasti-pasti saja,” jelasnya.

Milton menuturkan, penambahan kilang juga perlu memikirkan mengenai pasokan dan jenis *crude oil* yang dihasilkan sehingga optimalisasi nilai tambahnya bisa dirasakan. “Yang terpenting pasokan *crude*-nya. Penambahan kilang juga perlu memperhatikan

jenis *crude*-nya. Sebab jenis *crude* itu bermacam-macam,” tuturnya.

Soal subsidi BBM, Milton mengatakan negara sudah lama terbebani oleh subsidi yang hampir mencapai 380 triliun rupiah. Sehingga perlu adanya penyesuaian harga BBM. “Kalau rupiah kita melemah seribu perak saja, kita rugi sampai triliun,” katanya.

Dalam kunjungan kali ini, tim kunjungan diikuti pula oleh beberapa orang anggota Komisi VII DPR, yaitu Tri Yulianto, Asfihani, Azwir Dainy Tara, Isma Yatun, Rofi Munawar, Alimin Abdullah, Tommy Adrian Firman, Nur Yasin, Saifudin Donodjoyo. (nt), foto : dok/parle/hr.

## Pramono Sesalkan Kenaikan TDL Jelang Pilpres

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyayangkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bertahap yang diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Pasalnya, banyak masyarakat tengah berkonsentrasi menjelang Pilpres dan pembacaan nota Keuangan pemerintah Agustus mendatang. “Memang seyogyanya TDL itu tidak dinaikkan saat orang konsentrasi Pilpres, namun ini merupakan kewenangan Komisi dan Pimpinan hanya meneruskan keputusan Komisi VII DPR, dan tidak elok untuk menghambat proses ini,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung Nusantara I, Kamis, (12/6).



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Menurut Pramono, pemerintah harus segera melakukan proses sosialisasi sehingga tidak meresahkan masyarakat

kecil. “Kenaikan ini jangan sampai masyarakat tidak mengetahui, dan terkena dampaknya,” katanya.

Dia menambahkan, proses inefisiensi di PLN masih besar dan belum ada perbaikan signifikan sehingga persoalan subsidi belum terselesaikan sampai saat ini. “Perlu ada pimpinan yang kuat untuk memutus mata rantai ini, salah satunya dengan memanfaatkan gas, namun faktanya gas Indonesia banyak dijual keluar negeri, sehingga banyak pembangkit yang tidak jalan dan menyebabkan *overheat*,” jelasnya.

Kenaikan tarif akan diberlakukan setiap dua bulan sekali dengan besaran antara 5,36-11,57 persen setiap dua bulan sekali. Setelah 1 Juli, kenaikan akan diberlakukan 1 September dan terakhir 1 November 2014. (Sugeng Irianto) foto: odjie/parle/iw.

## Milton Pakpahan Gantikan Sutan Bhatoegana Sebagai Ketua Komisi VII DPR

Sutan Bhatoegana akhirnya digantikan oleh Milton Pakpahan sebagai Ketua Komisi VII DPR RI. Pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Pramono Anung, di Gedung Nusantara I, Kamis, (12/6).

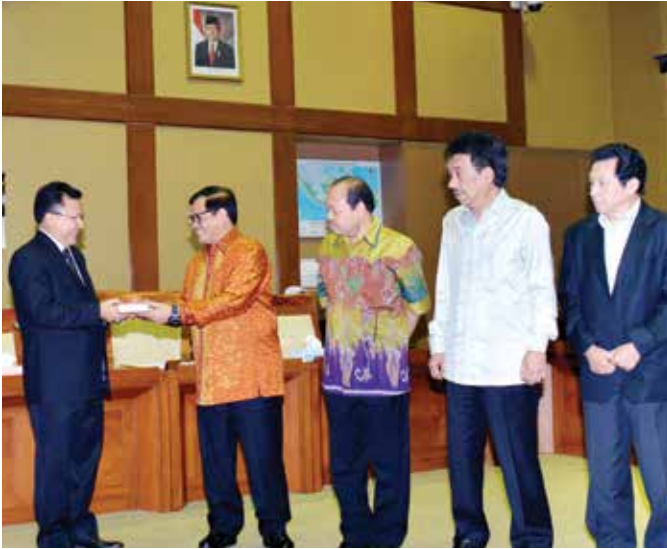
Anggota Komisi VII DPR Teuku Rifky Harsa dari Partai Demokrat mengatakan, pergantian posisi Ketua Komisi VII DPR merupakan jawaban dari permohonan Sutan Bhatoegana yang berniat untuk lebih fokus terhadap persoalan hukum yang dihadapinya.

“Jadi kita sambut baik dan kita mengucapkan terima

kasih karena telah bertugas dengan baik sebagai Pimpinan Komisi VII DPR,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengharapkan pergantian pimpinan Komisi VII DPR diharapkan semakin kondusif, tenang dan sejuk. “Saya mengucapkan selamat kepada Milton Pakpahan yang akan memimpin Komisi VII DPR untuk waktu empat bulan kedepan,” jelasnya.

Menurutnya, Komisi VII DPR harus bekerja keras dan memberikan perhatian secara khusus, khususnya asumsi-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyerahkan palu kepemimpinan kepada Milton Pakpahan.

asumsi makro terkait ESDM. “Bagi Ketua Komisi VII DPR diharapkan memberikan semangat baru dan dapat membangun kebersamaan di Komisi VII DPR,” ujarnya.

Milton Pakpahan merupakan salah satu alumni ITB, dan pernah bekerja di Pertamina hingga memutuskan berhenti dan melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar master di Institut Bisnis Indonesia. Di sisi lain, Milton merintis usaha yang terus berkembang hingga sukses. Dari pergaulan Milton berkenalan dengan politik dan ikut membantu perjuangan para mahasiswa saat reformasi menumbangkan Orde Baru tahun 1998 lalu.

Milton bergabung dengan Partai Demokrat sejak tahun 2003, sejak awal partai ini dibentuk. Di tahun 2004, Milton menjadi calon legislatif dari daerah pilihan Jawa Tengah. Milton ikut mendirikan kelompok pemuda di lingkungan Partai Demokrat yang bernama Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNPD). Beliau juga dipercaya sebagai Penasehat Angkatan Muda Demokrat. (Sugeng Irianto) foto: [odjie/parle/hr](#).

## Komisi VIII Segera Bahas RUU Pengelolaan Keuangan Haji

DPR RI sepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI yang pertama kalinya oleh Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim Saefuddin, Kamis (12/6) di Senayan, Jakarta.

“Seluruh fraksi di DPR sepakat bahwa untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai RUU Pengelolaan Keuangan Haji. Karena selama ini yang jadi sorotan publik itu tidak hanya penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri, tetapi juga tentang pengelolaan keuangan haji. Hal ini untuk menghindari kecurigaan publik terhadap pengelolaan keuangan haji. Oleh karena itu RUU Pengelolaan Keuangan Haji ini harus dibahas secepatnya, sehingga pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan ibadah haji ini tidak main-main, karena sudah ada payung hukumnya,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir usai memimpin rapat kerja dengan Menteri Agama.

Meski menyepakati pembahasan lebih lanjut RUU Pengelolaan Keuangan Haji ini, ditambahkan Wakil Ketua Komisi VIII, Leidia Amalia namun ada beberapa catatan penting untuk pemerintah terhadap RUU yang menjadi usulan pemerintah ini. Diantaranya adalah pembentukan badan khusus untuk pengelolaan keuangan haji ini, pengelolaan dana abadi umat sebagai sisa dari penyelenggaraan ibadah haji, harus ada pembicaraan tentang apa yang disebut dengan dana optimalisasi, serta mana dana yang langsung diperuntukan bagi jemaah dan mana dana yang tidak.

“Dalam draft yang diusulkan pemerintah harus ada badan



Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir memberikan ucapan selamat kepada Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim Saefuddin.

khusus untuk mengelola keuangan haji sehingga memungkinkan jika dana yang disetorkan jemaah itu untuk investasi. Jika itu dilakukan untuk investasi harus jelas, manfaatnya yang diterima oleh jemaah, bagaimana jika keuangan itu ditarik oleh jemaah, jadi harus transparan. Karena ini jemaah haji, maka jika harus diinvestasikan tentu harus berbasis syariah, dan keseluruhannya untuk dikembalikan atau untuk kepentingan jemaah,” papar Leidia.

Mengenai bentuk dari badan khusus itu sendiri, baik Mahrus maupun Leidia mengatakan belum ada pembahasan tersebut. Namun DPR cenderung menginginkan badan khusus yang harus terpisah dari penyelenggara ibadah haji. Jika kemudian penyelenggara ibadah hajinya Kementerian

Agama, maka dalam RUU Pengelolaan Keuangan ibadah haji itu sendiri harus di luar Kementerian agama.

“DPR lebih cenderung menginginkan badan khusus di luar Kement-

rian Agama yang akan mengelola keuangan haji. Dan akan bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Sementara pemerintah sendiri menginginkan badan khusus pengelo-

laan haji yang akan tercantum dalam RUU Pengelolaan keuangan haji kelak itu berada di bawah Kementerian Agama,” ungkap Ledia. (Ayu/Zah) foto: andri/parle/iw

## Legislator Minta Cabut Sukabumi Sebagai Kota Layak Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dalimi meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP & PA) untuk mengevaluasi bahkan mencabut predikat “Kota Layak Anak” yang pernah diberikan kepada Kabupaten Sukabumi, Jawa-Barat. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri PP&PA, Linda Amalia Sari Gumelar Rabu (11/6) di Senayan, Jakarta.

“Kemen PP & PA harus mengevaluasi bahkan mencabut predikat Kota Layak Anak yang pernah diberikan kepada Kabupaten/Kota Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyusul mencuatnya kasus pedofilia yang dilakukan Emon kepada 100 anak di daerah tersebut. Kenyataan ini sangat kontradiktif dan tidak pas dengan terminologi Kota Layak Anak,” ungkap Dalimin.

Ditambahkannya, sebagaimana diketahuinya sejak Januari 2014 lalu Kota Sukabumi beserta empat Kabupaten dan Kota lainnya dijadikan daerah percontohan “kota layak anak”. Bahkan sebagaimana yang dilansir berbagai media massa, ketika itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Sukabumi, Kostaman mengatakan selain Sukabumi, Karawang, Sumedang, Depok dan Bogor menjadi empat daerah di Jabar yang dijadikan daerah percontohan oleh Pemprov Jabar. Tujuan Kota Sukabumi menjadi daerah percontohan kota layak anak di Jabar ini untuk benar-benar paripurna dengan memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.

Namun, Menteri PP & PA, Linda Amaliasari membantah hal tersebut. Saat ditemui usai raker dengan Komisi VIII DPR RI Linda mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum memberikan predikat Kota Layak Anak kepada Sukabumi. Sehingga tidak ada yang perlu dicabut. Meski demikian, Linda mengaku akan terus mengevaluasi Sukabumi dan kota/kabupaten lainnya yang tengah mendapat predikat “menuju kota layak anak”.



Anggota Komisi VIII DPR Dalimi.

“Secara lisan kami sudah bicara ke walikota/bupati Sukabumi, beliau juga terpuak dengan kejadian tersebut. Disini sebenarnya kami belum memberikan predikat Kota Layak Anak kepada Kabupaten/ Kota manapun, melainkan hanya predikat “Menuju Kota Layak Anak” dan tahun 2014 ini kita tidak memberikan penghargaan tersebut kepada Kabupaten dan Kota manapun. Semua Kabupaten dan Kota masih dilakukan evaluasi,” jelas Linda.

Ditambahkannya sebenarnya predikat Kota Layak Anak ini merupakan sebuah tujuan yang jalannya masih panjang, dan bukan semata-mata berbentuk predikat atau penghargaan saja. Sehingga ke depannya masih perlu panduan, dan evaluasi yang berkesinambungan untuk terciptanya tujuan tersebut. Linda yakin jika sudah berkaitan dengan hak anak, walikota dan siapapun pasti akan terus mendukung dan peduli terhadap hal tersebut. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

## DPR Desak Presiden Terbitkan Perpres 105 dan 106

Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berlaku per 1 Januari 2014. Dengan berlakunya UU ini, Peraturan Presiden No 105 dan 106 tahun 2013 yang mengatur pemelihara-

an kesehatan pejabat negara dicabut oleh Presiden. Imbasnya, berdampak kepada lembaga negara, salah satunya DPR RI.

“Dicabutnya Perpres 105 dan 106 ini cukup berdampak kepada DPR RI. Pencabutan Perpres ini karena counter dari beberapa pihak. Untuk itu kami mendesak agar presiden segera

merampungkan Perpres yang saat ini sedang digodok kembali untuk segera diterbitkan,” kata anggota Komisi XI Indah Kurnia pada Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (10/6).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, dengan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab Anggota DPR RI, diperlukan pelayanan paripurna jika menjalani pengobatan atau pemeliharaan kesehatan.

“Tanpa bermaksud mendapat *privilege* (hak istimewa) yang berlebihan, tetapi pasca berlakunya UU BPJS, kami dan beberapa anggota DPR yang memerlukan pelayanan paripurna itu menemui kendala. Mudah-mudahan Presiden segera menerbitkan Perpres, sehingga dengan adanya Perpres ini, Anggota DPR periode ini masih sempat menggunakan pelayanan paripurna sampai dengan akhir masa jabatan di 2014 ini,” harap Politisi asal Dapil Jawa Timur ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden harus mencabut Perpres Nomor 105 dan 106 tahun 2013, yang menjadi jaminan pejabat negara untuk berobat ke luar negeri. Perpres Nomor 105 tahun



Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia.

2013 mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu. Sedangkan Perpres Nomor 106 tahun 2013 mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan lembaga negara. Hal ini meliputi Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR RI, DPD, BPK, KY, Hakim MK dan Hakim Agung MA.

Sebelumnya, Ketua BPK RI dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 menyatakan bahwa masih ada permasalahan dalam pelak-

sanaan BPJS Kesehatan yang baru saja diluncurkan oleh Pemerintah.

“Menurut pengamatan kami masih banyak kendala, yakni belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pelayanan BPJS, dan belum sinkronnya aspek teknis dalam pelayanan di lapangan, serta permasalahan dalam proses migrasi dari pengguna Askes menjadi pengguna BPJS Kesehatan,” jelas Rizal.

Untuk itu, tambah Rizal, pihaknya mengharapkan Kementerian Kesehatan dan BPJS segera melengkapi peraturan pelaksanaan sebagai implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial agar pelayanan BPJS lebih mudah dan menyentuh kebutuhan rakyat miskin.

“Disamping itu, kami juga ingin menyoroti perlunya ada jaminan kesehatan kepada prajurit. Kami mengharapkan Kementerian Kesehatan dengan Kementerian terkait untuk bersama-sama membuat mekanisme tersendiri untuk para prajurit apalagi yang bekerja di daerah terluar,” harap Rizal. (sf, zah)/foto:andri/parle/iw.

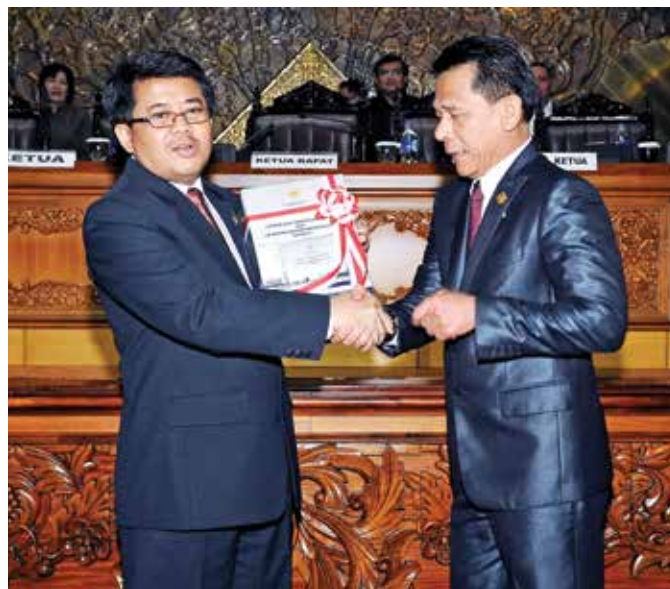
## BPK Berikan Opini WDP atas LKPP 2013

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Opini ini sama dengan opini yang diterima Pemerintah atas LKPP Tahun 2012. Ada dua permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2013 yakni Permasalahan Piutang Bukan Pajak pada Bendahara Umum Negara (BUN) dan Permasalahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Permasalahan pertama, mengacu pada kelemahan dalam pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu nilai Piutang *Over Lifting* Migas sebesar Rp 3,81 triliun dari total Rp 7,18 triliun belum pasti dan masih memerlukan pembahasan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait.

“Selain itu, yang sama juga terkait dengan nilai Piutang Penjualan Migas Bagian Negara sebesar Rp 2,46 triliun dari total Rp 3,86 triliun yang belum pasti dan juga masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait,” jelas Ketua BPK Rizal Djalil saat membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 pada Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (10/06).

Selain itu, nilai Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan



Ketua BPK Rizal Djalil menyerahkan LKPP kepada Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Nasional (BPPN) yang disajikan sebesar Rp66,01 triliun belum termasuk nilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri dan Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang lebih dari



enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali belum disajikan sebagai Piutang.

“Permasalahan kedua mengenai penyajian Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2013 sebesar Rp66,59 triliun yang kemungkinan mengandung salah saji,” tambah Rizal.

Riza menjelaskan, LKPP Tahun 2013 yang diperiksa meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.438,89 triliun atau 95,80% dari anggaran 2013. Sedangkan, realisasi Belanja Negara dan Transfer sebesar Rp1.650,56 triliun atau 95,62% dari anggaran tahun 2013 dan

realisasi defisit sebesar Rp 211,67 triliun.

Dalam Neraca per 31 Desember 2013, Pemerintah menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 66,59 triliun, Aset sebesar Rp3.567,59 triliun dan Kewajiban sebesar Rp2.652,10 triliun terutama berupa utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp1.890,75 triliun.

“Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas LKPP kepada DPR ini bertujuan untuk membantu DPR dalam menjalankan fungsinya dan mengambil keputusan atas rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2013,” harap Rizal. (sf,br)/foto: iwan armanias/parle/hr.

## Moratorium Pendaftaran Haji Untuk Benahi Layanan

Wacana menggulirkan moratorium pendaftaran haji terus mendapat dukungan dari DPR. Daftar tunggu yang sudah terlalu panjang bak benang kusut, harus dihentikan sementara sambil melakukan pembenahan layanan haji.

Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman mendukung adanya wacana melakukan moratorium pendaftaran haji. Bagi Sohibul, moratorium ini harus sekaligus melakukan pembenahan layanan haji. Jangan terus menerima pendaftaran, tapi tak ada pembenahan sama sekali.

“Setiap kebijakan apapun kalau ada moratorium harus tujuannya adalah

membenahi, bukan semata-mata karena sudah kebanyakan kuota hajinya. Sambil moratorium sambil dibenahi,” kata Sohibul di DPR, Selasa (10/6). Seperti diketahui, daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia minimal 5 tahun. Di beberapa daerah bahkan ada yang mencapai belasan tahun.

Diharapkan Sohibul, pemerintah jangan terus membuka pendaftaran haji, karena selain daftar tunggunya sudah terlalu panjang juga tidak bisa memberi kepastian kepada para calon jemaah untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Akhirnya, dana calon jemaah terus menumpuk di rekening pemerintah tanpa terkontrol.



Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman.

“Jangan terus pemerintah menerima pendaftaran. Padahal, menunggunya sudah 5 tahun. Itu pun tidak memberi kepastian. Kalau pun masih ada yang mendaftar, bayarnya hanya setor saja sebagai tanda jadi, sehingga uangnya tidak menumpuk,” tutur Sohibul. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

## DPR Apresiasi Kepala Daerah Yang Antisipatif Wilayah Bencana

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI saat meninjau bencana gunung Sangeangapi di Bima provinsi Nusa Tenggara Barat, Ida Fauziyah mengungkapkan temuannya bahwa di setiap daerah bencana kebutuhannya berbeda. Hal tersebut dikatakan Ida setelah berdialog langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Sangeang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB, baru-baru ini.

“Akhirnya kita tahu, antara satu daerah dengan daerah lain kebutuhannya berbeda. Kalau gunung Sangeangapi ini, kita turut bersedih tapi masih bisa bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Yang perlu kita dorong adalah sosialisasi kondisi gunung Sangeangapi yang sebenarnya, masyarakat awam jangan mudah percaya isu tsunami. Sosialisasi itu penting dan bagaimana mengatasi dan mengantisipasi situasi terburuk serta selalu memantau perkembangan terkini gunung tersebut,” ujar Ida.



Tim Kunker Komisi VIII DPR saat meninjau bencana gunung Sangeangapi di Bima.

Bencana meletusnya gunung Sangeangapi memang tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Adapun dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah saat letusan terjadi, hujan abu vulkanik bercampur pasir yang bisa menyebabkan sakit pernafasan (ispa), ada juga masyarakat yang merasa gatal-gatal seperti dilansir beberapa media.

Lebih lanjut, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi langkah Bupati Bima pada tahun 1985 yang sudah mengosongkan gunung tersebut dengan melakukan transmigrasi lokal penduduk di pulau Sangeangapi ke Kecamatan Wera (Sangeang Darat).

“Apa yang dilakukan Bupati Bima pada tahun 1985 silam, bisa masyarakat rasakan manfaatnya sekarang dimana saat terjadi letusan gunung Sangeangapi korban jiwa bisa dihindari, langkah positif tersebut harusnya juga ditiru oleh para kepala daerah lainnya yang wilayahnya memiliki potensi bencana,” himbau Ida.

Didampingi Camat Wera, Julfan Akbar dan unsur Muspida Kab. Bima, Ida bersama empat anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, meninjau langsung kondisi gunung Sangeangapi dari tepian pantai Desa Sangeang yang berjarak sekira 6 kilometer dari pulau Sangeang.

Beberapa warga yang melihat kehadiran rombongan

anggota DPR pun tak menyalahkan kesempatan untuk mengungkapkan keresahan mereka. Warga yang sehari-hari bekerja sebagai peternak dan berkebun di seputaran kaki gunung Sangeangapi mengaku mengalami kerugian besar lantaran kemungkinan banyaknya ternak mereka yang mati terkena letusan. Rasa penasaran mereka terhadap nasib hewan ternak kian tak terbendung, akibat status siaga I yang mengharuskan mereka menjauh dari gunung Sangeangapi sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan.

“Yang diperlukan saat ini adalah koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Sosial (Kemensos), untuk mendafta dampak letusan gunung Sangeangapi, termasuk berapa jumlah hewan ternak yang mati. Beternak dan berkebun adalah mata pencaharian utama bagi mereka, tentu bencana ini berdampak langsung secara ekonomi. Saya menghimbau Pemda memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Ida menenangkan warga.

Ida menambahkan bahwa bantuan uang yang diberikan BNPB nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Adapun bantuan beras 1 ton dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu tidak langsung didrop begitu saja, tapi harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terkena dampak langsung. *(naefuroji) foto: odjie/parle/hr.*

## Komisi VIII Pertanyakan Kesiapan BNPB Hadapi El Nino

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ade Barkah mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Selasa (10/6).

“Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi fenomena El Nino yang merupakan musim empat atau lima tahunan. Dampak El Nino itu yang notabene merupakan musim kemarau panjang itu bisa berakibat pada kebakaran hutan. Dan seperti diketahui juga wilayah hutan Indonesia sangat rentan terhadap kebakaran hutan,” ujar Ade Barkah.

Ditambahkannya, sebelum El Nino datang, ada baiknya pemerintah Indonesia dalam hal ini BNPB sebagai badan nasional yang bertugas menanggulangi bencana mempersiapkan segala sesuatunya.

Menjawab hal tersebut, Kepala BNPB Syamsul Ma'arif mengatakan bahwa untuk mengantisipasi dampak El Nino khususnya untuk bencana kebakaran hutan BNPB telah menyiapkan dana 355 miliar.

“Sebenarnya kebakaran hutan itu merupakan domain dari Kementerian Kehutanan. Namun karena bapak Presiden mengatakan hal itu bencana, ya menjadi tanggung jawab kami juga. Kami telah menyiapkan 355 miliar untuk mengantisipasi kebakaran hutan akibat fenomena El Nino. Diperkirakan El Nino datang dari arah timur, yakni tepat di Provinsi Riau, dan jika terjadi kebakaran maka asapnya akan mengarah ke negara lain, yaitu Singapura,” jelas Syamsul Ma'arif.

Dijelaskannya, jumlah 355 miliar itu diperlukan untuk menyewa pesawat. Itu pun dikatakan Syamsul, pihaknya harus antri hingga tiga bulan lamanya. Sementara untuk membeli pesawat, selain dana BNPB tidak mencukupi, biaya perawatannya pun cukup tinggi.



Anggota Komisi VIII DPR Ade Barkah.

Selain itu, langkah yang telah dipersiapkan BNPB adalah menyiapkan lima orang petugas untuk masing-masing desa di Riau yang akan digaji per bulan. Petugas inilah yang nantinya akan melaporkan jika terjadi asap kebakaran hutan.

BNPB juga telah siap untuk melakukan modifikasi cuaca untuk kawasan Sumatera, dan Kalimantan. Bahkan untuk menanggulangi kekeringan, BNPB juga telah menyiapkan tangki-tangki air, dan pembuatan embung-embung. *(Ayu/zah), foto : andry/parle/hr.*

# Pemerintah Masih Ambil Jalan Pintas

Pemerintah harus meng-upayakan pengetatan fiskal secara ekstra, guna menekan belanja dan mendorong penerimaan, karena defisit anggaran tahun 2014 berpotensi mencapai 4,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, upaya ekstra ini dianggap hanya menggunakan jalan pintas dan bersifat sementara.

“Kelihatannya pemerintah masih mengambil jalan pintas. Sebetulnya bukan hanya perubahan kurs, tapi juga penerimaan perpajakan juga mengalami koreksi. Jadi tidak *match*, ada perubahan di kurs, namun juga ada faktor penerimaan negara yang tidak bisa lagi mengimbangi biaya pembelajaran negara nasional,” jelas Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Rahmat berdialog dengan Gubernur BI.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela rapat antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana membahas RAPBN-Perubahan 2014, di Gedung Nusantara I, Senin (9/06).

Politisi PKS ini juga menilai, koreksi terbesar itu ada di perubahan kurs rupiah. Pasalnya, kurs rupiah memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun, subsidi BBM juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kalau bicara soal keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita, APBN-P sedang mengalami banyak tekanan, karena banyak pengaruh eksternal. Selain kurs, meningkatnya subsidi BBM, dimana sebagian besar disubsidi oleh pemerintah, tidak bisa dikendalikan lagi,” tambah Andi.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan ini menambahkan, belum ada modus yang lebih solid dan penyelesaian yang lebih komprehensif terhadap problem kebijakan energi.

“Muncul ide hanya untuk semen-

tara, walaupun ide individual secara akademik itu cukup kuat. Tapi sifatnya karena parsial, jadi hanya menyelesaikan persoalan energi secara parsial saja,” imbuh Andi.

Hal lain yang harus menjadi perhatian juga adalah soal energi listrik. Subsidi kepada PLN meningkat hingga mencapai Rp 130 triliun. Bahkan, angka itu akan meningkat terus sampai 2018.

“Kita juga mau tidak mau impor listrik, karena program listrik kita gagal. 10 ribu megawatt tahap pertama cuma tercapai 6 ribu megawatt. Kita memang punya masalah dengan upaya untuk meningkatkan rasio elektrofikasi kita mencapai 70-80%. Pada saat yang sama, kita juga punya masalah dengan ketersediaan sumber energi. Ini menimbulkan ke angka belanja negara, ini yang harus dihadapi oleh pemerintahan yang baru,” tambah Andi.

Sebelumnya, Menkeu Chatib Basri mengatakan defisit anggaran bisa mencapai 4,96 persen dari (target APBN) 1,69 persen, kalau tidak ada upaya keras dari pemerintah.

Pelebaran defisit anggaran tersebut salah satunya adalah akibat penerimaan pajak yang tidak mencapai target, karena adanya revisi pertumbuhan ekonomi serta pelemahan harga komoditas tambang.

“Defisit meningkat, setiap pelemahan rupiah Rp 100, menjadi Rp 3 triliun - Rp 4 triliun. Karena asumsi meningkat dari Rp 10.500 ke Rp 11.700, berarti ada selisih Rp 1.200 yang dikalikan Rp 3 triliun-Rp 4 triliun, maka beban defisit Rp 48 triliun,” jelas Chatib.

Menurut Chatib, apabila tidak ada upaya untuk menahan pelebaran defisit anggaran, maka penerimaan pajak akan hilang Rp 110 triliun, belanja subsidi meningkat hingga Rp 348 triliun dan pembayaran bunga utang mencapai Rp 14 triliun. Untuk itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya ekstra, agar defisit anggaran tidak makin melebar dan terjaga dalam kisaran 2,5 persen terhadap PDB, sesuai dengan target yang diusulkan dalam RAPBN-Perubahan 2014. (sf,zah)/foto:odjie/parle/iw.

# Masyarakat Serdang Bedagai Minta Tanahnya Dikembalikan



Ketua DPR RI Marzuki Alie berdialog dengan jajaran BPN.

Masyarakat Serdang Bedagai, tepatnya yang tinggal di Kampung Panguripan, Desa Paya Bagas, Sumatera Utara, kembali mendatangi DPR untuk menuntut pengembalian hak atas tanah mereka yang dirampas PTPN III. Kedatangan mereka ke DPR sudah yang ke empat kali, tapi belum juga menemukan titik temu atas persoalan tanah yang membelitnya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie memfasilitasi pertemuan masyarakat dari Panguripan, Paya Bagas tersebut dengan PTPN III dan BPN di ruang rapat pimpinan, Rabu (11/6). Marzuki mendesak agar BPN segera menyelesaikan persoalan ini dalam 3 (tiga) minggu. Suwarno Ketua Kelompok Tani Panguripan mengungkapkan, warganya banyak diintimidasi oleh aparat keamanan untuk meninggalkan rumahnya, karena kepemilikan tanah sudah dikuasai PTPN III dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Para ibu, warga Panguripan berkeluh kesah, karena terus mendapat acaman dan kekerasan. Mereka dipaksa keluar dari kampung halamannya sendiri. Menurut Suwarno, warganya sudah menempati kampung tersebut sejak tahun 1936 berdasarkan dokumen yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Sebelumnya, DPR sudah memfasilitasi tiga kali pertemuan. Namun, hingga kini belum juga mendapat penyelesaian.

Marzuki menghimbau agar pegawai BPN bekerja sebagai abdi negara dengan menggunakan hati nurani. Jangan dipaksa masyarakat untuk mengadu ke pengadilan, karena mereka tak memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang memadai. Bila sengketa ini dibawa ke pengadilan, masyarakat pasti kalah. Ada tanah seluas 82 hektar yang ditempati warga. Menurut keterangan Suwarno, tahun 1965 PTPN telah mengajukan HGU dan kemudian diperpanjang pada tahun 1995.

“BPN bekerja sama dengan PTPN untuk menguasai tanah warga. Mereka tidak berpihak pada warga. Untunglah ada Ketua DPR yang tidak berpihak dan mau membela masyarakat,” kata Suwarno. Sementara itu Marzuki bersikap lugas membela warga yang hak-haknya dirampas dan mengalami trauma kekerasan.

“Kalau haknya punya masyarakat, ya kita kembalikan ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini dikorbankan untuk kepentingan usaha. Kita tahu PTPN punya negara. Janganlah menyakiti masyarakat. Harusnya PTPN berada di tengah-tengah. Kalau alasannya salah, mereka harus akui salah saat menerbitkan HGU,” tandas Marzuki. (mh)  
*foto:odjie/parle/iw.*

## Komisi VII DPR Setujui Kenaikan Tarif Listrik Bertahap

Komisi VII DPR menyetujui kenaikan listrik bertahap bagi enam golongan pelanggan terhitung awal Juli nanti. Demikian salah satu butir Raker pembahasan dan penetapan rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)-P 2014 dengan Menteri ESDM Jero Wacik, di Gedung Nusantara I, baru-baru ini.

“Komisi DPR menerima dan menyetujui usulan pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial saat membacakan kesimpulan Raker tersebut.

Dengan persetujuan ini, kenaikan tarif ini maka subsidi listrik berjalan ditetapkan menjadi Rp 86,84 triliun dari yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 107,15 triliun. Hal ini lantaran total penghematan kenaikan tarif 6 golongan itu



Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial berdiskusi dengan Menteri ESDM.

sebesar Rp8,51 triliun. “Subsidi listrik berjalan sekarang kan Rp95,35 triliun. Jadi dalam RAPBN-P nanti subsidiya sebesar Rp86,84 triliun,” jelasnya.

Selain itu, Komisi VII DPR juga menerima dan menyetujui usulan pemerintah tentang asumsi dasar ICP, Produksi atau *lifting* minyak dan Gas Bumi, Volume BBM dan BBN bersubsidi, LPG 3 kg, Subsidi BBN, Subsidi LGV, Alpha BBM Bersubsidi dalam RAPBN-P tahun anggaran 2014.

Berikut rincian dalam RAPBN-P tahun anggaran 2014, untuk ICP 105 US/Barel, Produksi *lifting* Migas 818 ribu BOEPD, *Lifting* gas bumi 1224 Ribu BOEPD. Sementara total volume BBM Bersubsidi 46 juta KL termasuk premium dan Bio Ethanol, Minyak Tanah, Minyak Solar dan bio diesel. Untuk LPG 3 Kg 5.013 juta ton, untuk subsidi BBN bio diesel Rp1.500/liter sementara Bioethanol Rp2.000/liter. (si)/foto:andri/parle/iw.

## DPR Setuju Perubahan Kawasan Hutan DPCLS Sulut dan Kaltim

Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi RTRW Provinsi.

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo menjelaskan Sulawesi Utara berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.360/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 703 ha dan diperuntukan kepentingan yang ditetapkan sesuai rekomendasi Tim Terpadu dan tidak untuk kepentingan komersial lainnya.

Kalimantan Timur berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.469/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 73.731 ha diperuntukan pemukiman dan ladang kebun masyarakat setempat dan areal transmigrasi; Pembangunan jalan tol atau *freeway*; dan Lapangan udara



Suasana Raker Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan.

untuk kawasan pertahanan keamanan TNI serta penggunaan kawasan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang sudah eksisting saat ini.

Lebih lanjut, dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan, Rabu (11/6) di Gedung parlemen, Jakarta. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DPCLS 73.731 ha yang disahkan melalui persetujuan DPR RI tersebut tidak diperuntukkan pertambangan dan Perkebunan serta penggunaan komersial lainnya, serta sepanjang jalan tol atau *freeway* harus dilakukan pemagaran dan pengamanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

“Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis terhadap 2 (dua) provinsi

ini tidak meniadakan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini,” jelas Firman Subagyo.

Komisi IV DPR RI menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah agar tindak lanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. (as)/foto:rizka/parle/iw.

## Komisi III Pantau Sengketa Pemkab Morotai dengan PT MCM

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik memantau perkembangan kasus sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dengan PT. Morotai Marine Culture (MCM). Penyelesaian kasus yang bermula dari perselisihan investasi di bidang perikanan ini dinilai berlarut-larut dan telah memancing anarkisme sejumlah pihak.

“Kita datang ingin mendapat informasi langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan dan sejauh mana proses penegakan hukum terhadap persoalan ini. Apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Al Muzammil Yusuf yang memimpin kunjungan di Ternate, Rabu (11/6/14).

Ia menyebut Komisi yang membidangi masalah hukum ini telah menerima pengaduan dari sejumlah pihak dari Morotai yang datang langsung ke DPR. Kasus ini semakin menarik perhatian setelah Polda Malut menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Morotai sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas PT. MMC.

Sejumlah data yang berhasil dihimpun Komisi III di lapangan akan menjadi masukan dan dibahas lebih lanjut dengan mitra kerja terkait khususnya Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban di negara ini.

“Kita ingin kasus hukum yang telah berlangsung sejak 2012 ini bisa segera selesai. Kita juga mendorong terciptanya suasana kondusif di Provinsi Malut khususnya Kabupaten Pulau Morotai ini,” tekannya.

Al Muzammil yang juga Wakil Ketua Komisi III ini berkunjung ke Malut bersama sejumlah anggota diantaranya



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf.

Ruhut Sitompul (FPD), Abu Bakar Alhabsy (FPKS), Otong Abdurrahman (FPKB) dan Subiyakto (FPD). Di provinsi yang terkenal dengan Gunung Gamalama ini Tim Kunjungan Spesifik juga melangsungkan rapat dengan jajaran Kajati dan Polda Malut. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

## Komisi V DPR Desak Mitra Kerja Susun Program Yang Komprehensif

Anggota DPR dari Fraksi PPP Epyardi Asda mendesak Pemerintah untuk menyusun program yang dapat mewakili semua sektor termasuk kewilayahan dan kebidangan. Peralnnya, karena keputusan MK, saat ini DPR tidak membahas satuan tiga tetapi hanya program.

“Saya sudah lima tahun di DPR selama ini kemitraan sudah cukup bagus karena itu saya meminta Pemerintah segera menyusun program yang berkesinambungan sesuai RPJM,” jelasnya saat Raker dengan Seluruh Mitra Kerja Kementerian membahas Pembicaraan



Anggota Komisi V DPR Epyardi Asda.

awal RAPBN 2015, yang dipimpin oleh

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, di Gedung Nusantara, Rabu, (11/6).

Dia mengatakan, dirinya mendukung seluruh program yang berimplikasi bagi rakyat Indonesia. “Jangan buat program yang tidak berkesinambungan, karena kita ketahui infrastruktur wajib dan mendasar, swasembada pangan sampai sekarang belum tercapai targetnya,” jelasnya.

Dirinya mengusulkan kepada Pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan infrastruktur, karena itu perlu di-



pertimbangkan usulan peleburan Kementerian PU dan Dirjen Bina Marga. “Namanya bisa saja berubah menjadi Kementerian Jalan,” katanya.

Menurutnya, 32 ribu km jalan nasional belum bertambah secara signifikan bahkan jalan trans Sumatera, Kalimantan sampai sekarangpun masih belum berjalan. “Karena itu kita perlu

Kementerian khusus terkait jalan ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPR Fary Djemi Francis (Fraksi Gerindra) meminta pemerintah memberikan target RPJMN kepada DPR. “Kita ingin tahu sudah sampai mana capaian oleh Stakeholder Komisi V DPR ini, karena kita akan membicarakan anggaran

tahun 2015,”ujarnya.

Dia mengatakan, data capaian program Kementerian harus merujuk Rancangan Program Jangka Menengah dan Nasional (RPJMN), melalui cara ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi anggota Dewan mendatang. (si)/foto:rizka/parle/iw.

## Komisi IV Respon Keputusan MK tentang Kewenangan DPR RI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan hasil rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR, Pimpinan Badan Anggaran dan Wakil dari Pemerintah terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 PUU/9/2013, dimana MK mengabulkan sebagian gugatan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kewenangan DPR RI dalam pembahasan APBN dan APBN-P.

Ibnu Multazam mensosialisasikan dihadapan anggota Komisi IV ,saat Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan, Rabu (11/6), di gedung Parlemen Jakarta. Sesuai penjelasan Pimpinan DPR, saat ini DPR hanya boleh membahas anggaran dari fungsi dan program saja, artinya kegiatan-kegiatan itu tidak perlu ditandatangani di dalam penandatanganan lembar pengesahan APBN.

Ibnu Multazam menggambarkan memang terjadi perdebatan antara pimpinan-pimpinan Komisi yang hadir. “Kalau membahas program tanpa mengikutkan atau mengetahui kegiatannya, itu tidak mungkin. Tapi pimpinan hanya menggariskan bahwa untuk lembar pengesahan hanya sampai program,” untkannya.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, selama ini di Komisi IV penandatanganan pada lembar pengesahan hanya sampai pada program, tidak memparaf satuan tiga. Untuk itu, akhirnya Pimpinan DPR akan kon-



Jajaran Pimpinan Komisi IV DPR.

sultasi lagi dengan Pemerintah terkait apakah dokumen satuan tiga itu menjadi bagian di dalam pembahasan di Komisi.

“Kita ingin memperkuat pengawasan, dokumen satuan tiga diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam pembahasan di Komisi. Tentunya itu juga bisa dibahas,” tegas Ibnu.

Yang paling penting, kata Ibnu, Pimpinan DPR menyampaikan bahwa di dalam lembaran pengesahan tidak masuk yang ditandatangani. Artinya lembaran satuan tiga tidak termasuk yang ditandatangani.

Selanjutnya, dalam pembahasan APBN dan APBN-P, DPR tidak boleh membintang lagi. “Jadi DPR itu secara tegas menyetujui atau menolak,” katanya.

“Dalam programnya barangkali kelihatannya bagus tetapi kalau dilihat lebih dalam ada yang bias. Dalam kegiatan ini sekali lagi tetap kita bahas seperti biasanya, sebagai dokumen yang tidak terpisahkan, agar nantinya ada pemahaman yang sama antara DPR dan Pemerintah,” paparnya. (as)/foto:rizka/parle/iw.

# Komisi IX DPR Apresiasi Kinerja dan Program BPOM

Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati mengapresiasi kinerja Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pasalnya Kepala BPOM cepat merespon himbauan Okky untuk segera melakukan sidak terkait menghadapi bulan Ramadhan ini.

Hal tersebut, disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dipimpin Wakil Ketua, Nova Riyanti Yusuf dengan Kepala BPOM dan Kepala BNP2TKI di Ruang Rapat Komisi IX Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/6).

Okky juga memberikan apresiasi kepada Surat Keputusan Kepala BPOM mengenai distopnya obat-obat yang mengandung dextromethorphan. Karena menurut hemat Okky, obat-obat yang mengandung zat tersebut saat ini pemakaiannya sudah sangat memprihatinkan terutama bagi generasi muda.

Namun dalam kesempatan tersebut Politisi Fraksi PPP ini, mengkritik kinerja BPOM dalam hal pengembangan Obat Tradisional dan Jamu-jamuan. Karena hal tersebut tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan.

“Dan jika kita lihat, anggaran BPOM itu juga memang tidak banyak. Bagaimana kalau BPOM dan Kemenkes duduk bersama mengatur terkait pengembangan obat tradisional, mana yang menjadi bagian siapa. Jangan sampai *overlap*, supaya anggarannya juga menjadi efektif dan efisien,” papar Okky.



Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati.

Terkait Rencana Kerja BPOM, Okky meminta Program *Food Safety* masuk desa dan Gerakan Waspada Makanan dan Obat Ilegal menjadi jangkauan program dari BPOM. Dimana BPOM, jelas Okky, akan mengawasi mengenai Obat-obat Ilegal melalui internet.

“Saya ingin tahu bagaimana caranya, dan apakah ada kerjasama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi mengenai pengawasan obat-obat ilegal melalui internet ini,” tanya Okky.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Okky mengapresiasi Balai POM Surabaya yang sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Perikanan di Surabaya dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku bisnis mengenai jenis-jenis ikan yang baik seperti disampaikan Kepala BPOM.

“Saya rasa ini perlu ditingkatkan. Karena ini merupakan upaya promotif dan preventif bagi penjualan obat dan makanan di masyarakat,” imbuhnya.

Senada dengan Okky, Ahmad Nizar Shihab (F-PD) mengapresiasi kinerja Kepala BPOM. Kata Nizar, selama periode DPR 2009-2014 ini sudah empat kali pergantian Kepala BPOM dan setiap pembahasan anggaran, anggaran BPOM selalu dinaikkan oleh Komisi IX DPR.

“Hal itu merupakan wujud apresiasi kami kepada kerja keras Kepala BPOM. Pada tahun 2010 itu anggarannya hanya Rp695 Milyar, sekarang 2014 sudah meningkat menjadi Rp1,2 Triliun. Itu merupakan salah satu usaha Komisi IX DPR untuk meningkatkan anggaran BPOM. Dan bapak termasuk tim dari tiga tahun lalu,” jelas politisi F-PD.

Nizar juga mendukung keinginan BPOM untuk membentuk *Center of Excellent* BPOM karena kita segera masuk ke dalam perdagangan bebas yang semakin berkembang di masyarakat ekonomi ASEAN dimana kontrol itu harus kuat dan untuk meningkatkan SDM kita.

“Insyaallah teman-teman Komisi IX juga akan mendukung, karena itu akan meningkatkan citra bangsa Indonesia terhadap ASEAN,” ujar Nizar. (sc)/  
*foto:iwan armanias/parle/iw.*

## DPR Perjuangkan Anggaran Desa Wisata Tasikmalaya

Rencana pemotongan anggaran di semua kementerian dan lembaga berdampak pada program di daerah. Para delegasi otoritas daerah pun bedatangan ke DPR RI untuk mencari tahu sekaligus meminta dukungan, agar anggaran program di daerah

tidak dibatalkan, karena agenda penghematan dari pemerintah pusat.

Salah satunya yang dilakukan delegasi DPRD Kota Tasikmalaya yang menemui Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, Selasa (10/6). DPRD Kota Tasik-

malaya dan Dinas Pariwisata setempat menyesalkan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membatalkan program desa wisata di Tasikmalaya, lantaran ada pemotongan anggaran.





Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata menargetkan 2000 desa sebagai obyek wisata melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) bidang pariwisata. Dan Kota Tasikmalaya mendapatkan 5 lokasi desa yang dijadikan obyek wisata itu. Bahkan, pemerintah setempat sudah menyosialisasikan program desa wisata ke masyarakat. Masyarakat Tasik menyambut gembira sosialisasi ini.

Hanya saja, wacana pemotongan anggaran dari pemerintah pusat kemungkinan besar memupus semua harapan tersebut. Inilah yang disesalkan delegasi DPRD Kota Tasikmalaya di hadapan Sohibul Iman. Mereka meminta DPR untuk memperjuangkan anggaran, agar agenda desa wisata tidak dibatalkan.

Sohibul sendiri menyayangkan pembatalan agenda desa wisata di Tasikmalaya tersebut. Padahal, Tasik sangat



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman berbincang dengan Delegasi DPRD Kota Tasikmalaya.

potensial dengan industri kreatifnya yang berbasis desa. Pihaknya, berjanji akan memperjuangkan program tersebut di DPR. Menurut Sohibul pemerintah dan DPR sedang membahas secara serius wacana pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Belum ada keputusan atas rencana tersebut. Masih ada waktu sampai 18 Juni 2014.

DPR sebenarnya sangat tidak sepatutnya dengan rencana pemotongan anggaran itu. Pemotongan, kata Sohibul, akan menurunkan kinerja di semua kementerian dan lembaga, termasuk DPR RI. Bila tidak ada pemotongan secara nasional, maka program desa wisata kemungkinan akan tetap berjalan. (mh,put)/foto:iwan armanias/parle/hr.

## DPR Apresiasi Sikap Tiongkok Soal Perdagangan

Pemerintah Tiongkok tak mengambil keuntungan apa pun ketika perdagangan Indonesia mengalami defisit terhadap Tiongkok. Sebaliknya, Pemerintah Tiongkok malah mendorong Indonesia untuk meningkatkan eksportnya ke Tiongkok.

Sikap pemerintah Tiongkok tersebut sangat diapresiasi oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima Direktur Jenderal Kawasan ASEAN, Departemen Luar Negeri untuk Partai Komunis China Zhang Xuyi, di DPR, Senin (9/6). Di hadapan Zhan Xuyi, Marzuki mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao, yang mengatakan, Tiongkok tidak mau hidup dengan defisit perdagangan negara lain.

Pernyataan ini sangat melegakan bagi Indonesia. Dan berharap nilai defisit perdagangan tersebut suatu saat bisa mencapai nilai yang seimbang. Hubungan baik dengan Tiongkok ini tidak saja terjalin antar pemerintah dan parlemen, tapi hubungan dagang



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Dirjen Kawasan ASEAN, Departemen Luar Negeri untuk Partai Komunis China

juga terus mengalami tren yang sangat baik.

Sementara itu, Zhan Xuyi menyampaikan, siapa pun pemimpin di kedua negara yang terpilih nanti, hubungan

dagang harus tetap dipertahankan dengan baik. Dikatakan Zhang, kunjungan Ketua DPR Marzuki Alie beberapa waktu lalu ke Tiongkok sangat berkesan. Kunjungan tersebut kian menguatkan hubungan pemerintah dan

parlemen kedua negara. Sementara kunjungannya sendiri ke DPR kali ini, Zhang menilai sebagai kunjungan dari sahabat lama yang ingin tetap menjaga komunikasi dengan baik.

Pada bagian lain, Marzuki juga me-

ngomentari soal angka kunjungan masyarakat Tiongkok ke Indonesia yang masih minim. Tercatat, angka kunjungan ke Indonesia hanya 600 ribu. Terlihat minim bila dibandingkan dengan penduduk Tiongkok yang sudah mencapai 1 miliar lebih. Tahun 2015, ditar-

getkan angka kunjungan masyarakat Tiongkok mencapai 2 juta jiwa. Marzuki menjelaskan, di Indonesia banyak destinasi yang cocok bagi masyarakat Tiongkok. (mh,put) foto:iwan armanias/parle/hr.

## Komisi VIII Apresiasi Pembukaan MTQ ke XXV

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pembukaan MTQ (Musaqah Tilawatil Quran) ke XXV tingkat nasional berjalan dengan lancar di tengah kasus yang melibatkan pejabat Kementerian Agama. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII, Ida Fauziah saat menghadiri pembukaan MTQ ke XXV di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (6/6).

“Kami mengapresiasi pembukaan MTQ ke XXV tingkat Nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, walau tengah terjadi kasus hukum yang melibatkan pejabat Kementerian Agama yang notabene ikut menjadi panitia acara ini. Dengan kata lain, panitia MTQ XXV ini secara keseluruhan dapat dikatakan bersikap profesional dan tidak terpengaruh dengan apapun juga,” jelas Ida Fauziah.

Senada dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ida juga berharap agar acara tersebut tetap dilaksanakan di masa mendatang. Bahkan harus dilakukan perbaikan kualitas. Mengingat nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Quran sangat penting bagi masyarakat di tengah jaman yang semakin maju dan persaingan dunia yang semakin ketat.

“Nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran diharapkan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, demi terciptanya masyarakat Indonesia dan dunia yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah dan Anggota Komisi VIII saat menghadiri Pembukaan MTQ di Batam.

bapak Presiden, saya pun berharap acara MTQ ini dapat terus diselenggarakan,” tambahnya.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodidampingi Menkokesra Agung Laksono dan Gubernur Kepri H. M. Sani. MTQ ke XXV ini merupakan kesempatan terakhir bagi presiden SBY selaku presiden untuk menghadiri ajang tersebut. (Ayu)/foto:ayu/parle/jw

## Perlu Sanksi Keras Pelaku Kampanye Hitam



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakim Naja.

Bawaslu harus mencermati *black campaign* (kampanye hitam) yang marak akhir-akhir ini. Masyarakat Indonesia ini unik, calon yang dalam posisi didlolimi itu bisa mengundang simpati. Makanya tim suksesnya berusaha menjadikan calonnya dalam posisi yang didlolimi. Ini harus hati-hati. Tidak semata-mata bahwa *black campaign* seringkali dilakukan oleh pihak lain, tetapi dilakukan oleh diri sendiri agar masyarakat bersimpati.

“Ini harus betul-betul diwaspadai agar kampanye hitam, jangan sampai digunakan untuk mendapatkan dukungan, di sisi lain merugikan pihak lain. Bawaslu harus memberi sanksi yang keras,” tandas Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakim Naja kepada Parlemen baru-baru di Jakarta.

Mencermati perkembangan persaingan dua pasang capres sekarang ini, Hakam Naja mengatakan partisipasi masyarakat akan meningkat dibanding pemilu legislatif yang lalu. Masalahnya, pilihan masyarakat sudah jelas dengan ditetapkannya dua pasang capres-cawapres pada pemilu Presiden tanggal 9 Juli yang akan datang.

Masyarakat lanjut Hakam Naja, juga akan lebih simpel dengan hanya dua pasangan capres-cawapres. Selanjutnya, masyarakat sudah mulai menimbang-nimbang apakah calon nomor satu atau nomor dua, meski masih ada dari kelompok *swing voters* (masa mengambang) yang belum menentukan pilihannya.

Menurut Pimpinan Komisi yang membidangi pemerintahan dan pemilu ini, masa mengambang ini sangat menentukan. Sementara ini, katanya, kalau masa mengambang sebanyak 40% maka untuk sementara berdasarkan *survey* pemenangnya adalah *swing voters* tersebut.

“Mudah-mudahan angka partisipasi pemilih semakin bergerak naik, dan golputnya menurun. Tetapi siapapun pemenangnya, kita berharap Indonesia akan lebih maju, lebih sejahtera dan kita akan mempunyai pemimpin yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Hakam Naja. (mp) foto : naefurodjie/parle/hr.

## DPR : Kilang Minyak Tua Sebabkan Biaya Produksi BBM Mahal

Anggota Komisi VII DPR Asfihani (F-PD) mengatakan perlu adanya reformasi kilang-kilang minyak yang ada saat ini. Karena kilang yang ada sudah berumur tua sehingga dari segi kebutuhan sangatlah kurang memadai untuk bisa menampung volume yang semakin tinggi.

Hal itu disampaikan Asfihani saat melakukan kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke Kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan (UP) V Balikpapan, di Provinsi Kalimantan Timur, akhir pekan lalu.

Menurut Asfihani, kecenderungannya biaya produksi setiap kilang tua sangat mahal, sehingga mengakibatkan hasil biaya produksi dan harga pokoknya juga akan mahal. Seperti, kilang di Palembang dan di Balikpapan yang sudah hampir berusia 64 tahun.

“Dengan usia tersebut berarti kan biaya produksi dalam hal ini efisiensi penggunaan alat itu kan pasti akan mahal, *maintenance*-nya juga mahal, sehingga biaya pokok dari hasil BBM itu mahal pula. Dengan mahalnya biaya pokok ya tentunya akan membebani subsidi juga kan,” katanya.

Pemikiran ke depan, kata Asfihani, harusnya pembangunan kilang minyak baru menjadi prioritas karena untuk kebutuhan masa depan pasokan BBM dalam negeri.

“Meskipun investasi pembangunan kilang baru sangat mahal, tapi kan ma-



Anggota Komisi VII DPR Asfihani berdialog dengan jajaran Pertamina.

hal di awal saja, daripada setiap tahun puluhan triliun APBN kita dibuang hanya untuk impor BBM. Ini yang harus kita samakan visi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Menurut Asfihani, DPR dalam hal ini Komisi VII DPR terus mendorong pemerintah agar merealisasikan upaya pembangunan kilang-kilang baru tersebut. “Segala kebijakan untuk bisa merealisasikan kita dorong, termasuk menyetujui pengalokasian dalam APBN untuk pembangunan kilang tersebut. Bahkan Komisi VII DPR dan pemerintah sudah bikin studi kelayakan, tapi pemerintah belum melaksanakannya. Malah kita pernah kasih 500 milyar rupiah studi kelayakan untuk memancing investor. Sampai sekarang kita belum tahu kelanjutannya,” jelasnya.

Asfihani mengatakan kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan (UP) V Balikpapan, di Provinsi Kalimantan Timur secara spesifik untuk melihat kondisi kilang tersebut. “Kita juga ingin mengetahui bagaimana proses kerja kilang itu sendiri, sekaligus kita ingin mengetahui efisiensi kilang yang ada di Balikpapan ini, karena mengingat kilang di Balikpapan ini sudah sangat tua sekali,” katanya.

Dalam kunjungan kali ini, tim kunjungan diikuti pula oleh beberapa orang anggota Komisi VII DPR, yaitu Milton Pakpahan, Tri Yulianto, Asfihani, Azwir Dainy Tara, Isma Yatun, Rofi Munawar, Alimin Abdullah, Tommy Adrian Firmansyah, Nur Yasin, Saifudin Donodjoyo. (nt) foto : nita juwita/parle/hr.

# Sudah Saatnya KPK Bongkar Korupsi di Sektor Hulu

Anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Suding menilai sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi yang lebih besar. Selama ini menurutnya KPK sudah banyak mengungkap kejahatan dan menyelamatkan keuangan negara tapi baru di hilir belum sampai ke sektor hulunya.

“Penanganan kasus jangan hanya di hilir saja tetapi bagaimana sampai ke hulunya. Kartel di bidang migas sama sekali belum disentuh, kalau kasus Rudi itu termasuk kecil. Kemudian sektor pajak, kasus BCA seharusnya bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap kasus yang lebih besar, yang kecil-kecil biar polisi dan jaksa saja,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/14).

Ia meminta korupsi yang mempengaruhi sektor penerimaan negara ini harus semakin menjadi perhatian komisi anti rasuah karena akan berdampak pada postur APBN. Rapat Komisi III kali ini khusus membahas penyusunan



Anggota Komisi III DPR Syarifudin Suding.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - RAPBN 2015.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPDIP M.Nurdin meminta KPK menjelaskan tentang kenaikan anggaran yang diajukan tahun depan. Ia juga meminta perkembangan pembangunan gedung baru KPK yang memasuki tahun ketiga.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Zulkarnaen menjelaskan dalam RAPBN

2015 anggaran yang diajukan meningkat dibanding tahun lalu dari Rp600 miliar menjadi Rp800 miliar. Hal ini menurutnya terkait proses pembangunan gedung KPK yang berlangsung *multi years*.

Pada tahun 2015 menurutnya KPK telah menetapkan sejumlah prioritas kerja, diantaranya penanganan kasus *grand* korupsi dan penguatan aparat penegakan hukum melalui koordinasi dan supervisi. “KPK juga memberikan perhatian pada korupsi yang berdampak luas pada kepentingan nasional seperti ketahanan pangan plus, ketahanan energi dan lingkungan,” demikian Zulkarnaen.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli juga diikuti mitra kerja lain yaitu Wakil Jaksa Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung. Pada sesi selanjutnya Komisi Hukum akan melanjutkan membahas RAPBN 2015 diantaranya dengan Menteri Hukum dan HAM, Komnas HAM, LPSK dan BNPT. (iky)/foto:andri/parle/iw.

## DPRD Kediri Harapkan Revisi UU MD3 Segera Disahkan

Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sedang dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Banyak harapan muncul agar revisi UU ini segera selesai, karena masa jabatan DPR dan DPRD periode 2009-2014 segera berakhir. Tak terkecuali, harapan itu muncul dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kediri, Provinsi Jawa Timur.

“Harapannya revisi UU MD3 menjadi sesuatu yang positif, dan menjadi hukum positif yang akan kita jadikan acuan. Karena acuan kerja DPRD Kediri dari RUU MD3 ini, termasuk DPR periode yang baru nanti,” jelas Wakil Ketua DPRD Kediri Sentot Jamaludin, sebagai ketua rombongan, di ruang rapat Setjen DPR RI, Kamis (12/06).

Menanggapi harapan dari DPRD Kediri ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menyatakan harapan yang sama, dan sangat memahami apa yang menjadi keinginan DPRD Kediri. Palsanya, dengan masa jabatan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima DPRD Kediri.

Anggota DPR 2009-2014 yang berakhir kurang dari 3 bulan lagi, UU ini harus segera diselesaikan.

“Banyak yang berharap Revisi UU MD3 ini segera selesai, sehingga segera ada kejelasan bagi DPR, DPD, MPR, bahkan termasuk DPRD, karena ini UU-nya satu. Kalau targetnya, sebelum masa tugas periode ini selesai, revisi UU ini sudah selesai, karena ini akan menjadi dasar pelaksanaan tugas anggota periode yang akan datang,” jelas Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti.

Ia berharap segera ada kejelasan, baik ada perubahan atau tidak, sehingga segera ada penyesuaian di jajarannya. Bahkan, termasuk penyesuaian program dan kegiatan yang akan dilakukan berikutnya.

“Tapi ini kan keputusan politik yang diambil DPR. Saya berharap ada keputusan yang jelas, yang berubah apa, yang tidak berubah apa, sehingga kami bisa menyesuaikan. Termasuk aturan pelaksanaan yang harus disiapkan, dan penyesuaian tata tertibnya,” imbuh Win.

Selain membahas tentang Revisi UU MD3, pertemuan juga membahas tentang tugas dan fungsi Badan Musyawarah DPR RI. Dalam kesempatan ini, Sekjen DPR didampingi Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI Slamet Sutarsono, dan Kepala Bagian Badan Musyawarah Setjen DPR RI Nurani Bodroini. Acara diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari kedua belah pihak. (sf)/foto:odjie/parle/hr.

## Cegah Korupsi dengan Mereformasi Layanan Publik

Korupsi bisa dicegah dengan mereformasi layanan publik secara komprehensif. Ini penting dilakukan di semua lini layanan publik, termasuk di parlemen. Untuk mendukung pencegahan korupsi, DPR RI juga sudah merumuskan produk legislasi yang antikorupsi.

Demikian dikemukakan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin yang memimpin delegasi DPR dalam pertemuan *International Conference on the Role of Parliament in Advancing Public Policy against Corruption in Kyrgyzstan* yang digelar di Bishkek, Kyrgyzstan, 9-10 Juni 2014 lalu.

“Mereka mengharapkan kita hadir untuk berbagi pengalaman dan *best practices* mengenai kebijakan legislasi dalam pemberantasan korupsi di segala bidang,” jelas Dodi yang juga anggota F-PG. Selain Dodi, hadir pula Arif Budimanta Anggota BKSAP dari F-PDI Perjuangan. Keduanya menjabat anggota *Committee Public Relation, Campaign and Advocacy dan Committee on Good Governance dari Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*.

Sebelumnya BKSAP DPR telah merespon undangan Kyrgyzstan yang mengharapkan partisipasi GOPAC *Indonesian Charter* dalam konferensi internasional tersebut. Pada sesi *Parliament and its importance in addressing anti-corruption in public administration*, Dodi menekankan pentingnya reformasi mendasar pada layanan publik. Sejumlah produk legis-

lasi pun dihasilkan untuk mendukung terciptanya aparatur negara yang profesional, berintegritas, independen, dan berkualitas, seperti UU tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN (1999) hingga UU tentang Aparatur Sipil Negara (2013).

“DPR juga memberikan dukungan untuk remunerasi penghasilan pegawai sehingga mereka tidak lagi berpikir macam-macam saat bekerja,” ungkap Dodi, seraya juga menerangkan, ke depan Kode Etik Penyelenggara Negara diperlukan untuk mendukung kebijakan antikorupsi.

Pada kesempatan lainnya, Arif Budimanta menyampaikan perkembangan mengenai kebijakan-kebijakan transparansi dan pengawasan terkait industri ekstraktif. Dalam sesi *oversight and transparency in the extractive industries*, Arif mengungkapkan tata kelola industri ekstraktif tengah dibenahi oleh parlemen. “Salah satunya dengan melakukan amendemen terhadap UU Minyak dan Gas yang rencananya akan mengatur detail mengenai dana minyak dan gas, dana yang wajib disisihkan untuk peruntukan tertentu,” paparnya dalam konferensi tersebut.

Terkait rezim *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*, Indonesia sebagai *candidate country* tengah berjuang agar menjadi negara patuh (*EITI compliant country*). Rezim EITI adalah rezim yang mewajibkan perusahaan industri ekstraktif untuk menyampaikan secara transparan apa saja yang



Anggota BKSAP Dodi Reza Alex Noerdin.

mereka bayarkan kepada negara sekaligus memaksa negara untuk membuka seluas-luasnya informasi tentang pendapatan yang diterima dari industri tersebut.

“Kami telah mengajukan *Final Validators Report* ke *EITI Board* dengan harapan lolos menjadi *EITI compliant country*. Kami juga menyerap informasi dari Kyrgyzstan karena mereka telah lebih dulu menjadi *EITI compliant country*,” tutup Arif.

Selain mengikuti agenda konferensi, Delegasi DPR RI berkesempatan untuk berdialog dengan *Honorary Counsel of the Republic of Indonesia to Kyrgyz Republic*, Mr. Eduard Kubatov. Keduanya mendiskusikan beragam peluang untuk mempererat kerja sama bilateral kedua negara. (mh/BKSAP). foto: dok/parle

# Sistem Kapitasi BPJS Masih Jadi Persoalan

Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno mengatakan, terdapat berbagai persoalan BPJS Kesehatan di Semarang, diantaranya yaitu sistem kapitasi, formalium obat, serta kesejahteraan tenaga kesehatan.

“Kita ingin agar tenaga kesehatan di Semarang menjadi semakin profesional terkait diterapkannya BPJS Kesehatan,” ujar Supriyatno kepada Parlemen, di Semarang baru-baru ini.

Menurutnya, jumlah penduduk Jateng termasuk tiga besar di Indonesia karena itu sangat prospektif untuk dijadikan percontohan bagi BPJS Kesehatan. “Kita ingin tahu kendala apa saja terkait di sektor fasilitas primer dan sekunder, karena banyak sekali RS di Semarang.

Dia menambahkan, masih terdapat persoalan terkait BPJS Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan terhadap Gepeng, dan Masyarakat penyandang masalah sosial, anak terlantar. “Memang persyaratan ikut BPJS Kesehatan harus memiliki KTP karena itu mereka kesulitan mengakses BPJS Kesehatan, dan DPR telah menganggarkan untuk mereka,”katanya.

Soal telatnya tagihan RS Kariadi di BPJS Kesehatan, Supriyatno menjelaskan, itu memang menjadi persoalan bagi BPJS Kesehatan. “Kita meminta tagihan RS Kariadi jangan sampai terlambat karena gaji para dokter, perawat bisa



Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno berdialog dengan Dirut RS. Kariadi.

telat, karena itu ada usulan dibuat satu sistem semacam *bridging system*,” paparnya.

Melalui sistem *bridging finance*, lanjutnya, nanti BPJS Kesehatan akan memberikan DP bagi pelayanan kesehatan kemudian sisanya akan dibayar kemudian. “Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bagus, karena pembiayaan dan pelayanan sebagai sisi mata uang, jadi paling lambat setiap awal bulan sudah dibayarkan semua,” tandasnya. (Si), foto : sugeng irianto/parle/hr.

# Setjen DPR Terima Kunjungan DPRD Bangkalan

Sekretariat Jenderal DPR RI menerima kunjungan 24 Anggota DPRD Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini dimaksudkan untuk tukar pikiran terkait mekanisme, tugas, dan fungsi DPR RI, khususnya Badan Musyawarah DPR RI.

Dalam kesempatan ini, Setjen DPR RI diwakili oleh Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI Slamet Sutarsono, dan Kepala Bagian Badan Musyawarah Setjen DPR RI Nuraeni Bodroini.

“Selain ingin sharing, kami ingin meminta petunjuk dan arahan bagaimana mekanisme yang berlaku di DPR. Walaupun secara regulasi, tugas dan fungsinya DPR RI dan DPRD satu regulasi,” jelas Ketua Rombongan DPRD Bangkalan Munawar Kholil, ketika memulai pertemuan, di Ruang Rapat



Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI Slamet Sutarsono menerima DPRD Bangkalan.

Setjen DPR RI, Senin (9/06).

Dalam kesempatan tersebut, Slamet

menjelaskan berbagai mekanisme kerja dan Bamus DPR RI, termasuk beberapa Alat Kelengkapan Dewan yang



lain. Ia berharap, apa yang telah dipaparkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Bangkalan.

“Mudah-mudahan, penjelasan saya dengan Kabag Bamus, dan hal-hal lain yang kami paparkan akan menjadi pertimbangan DPRD Bangkalan dalam rangka tugas-tugas DPRD yang ada di Bangkalan. Dari pertemuan ini, dapat diketahui tugas-tugas Bamus dan AKD yang ada di DPR RI, supaya bisa menjadi perbandingan tugas-tugas yang akan dibuat oleh DPRD Bangkalan, atau yang akan direncanakan oleh DPRD yang akan datang,” jelas Slamet usai pertemuan.

Dalam kesempatan ini, juga disinggung terkait Rancangan Undang-

undang MD3 (MPR, DPR, DPD), dimana RUU ini sedang dibahas oleh DPR RI. DPRD mengusulkan agar Anggota DPRD menjadi pejabat negara. Pasalnya, saat ini Anggota DPRD masih berstatus perangkat pemerintah daerah, dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

“Ada beberapa yang diajukan untuk perubahan RUU MD3, terutama hal-hal yang menyangkut pejabat atau keanggotaan DPRD ini sebagai pejabat negara. Karena yang sekarang ini anggota DPRD itu adalah perangkat pemerintah daerah, maka fasilitas-fasilitasnya pun akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden terutama Perpres No 16 yang otomatis harus di bawah Pemerintah Daerah, bukan sesuai UUD MD3,” papar Slamet.

Pria berkacamata ini juga mengaku mendapat beberapa masukan lain dari hasil pertemuan ini. Salah satunya terkait dengan pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu. Ia menjelaskan, mekanisme pelantikan Anggota PAW jauh lebih mudah dibanding Anggota PAW DPRD.

“Pelantikan Anggota PAW ini akan lebih mudah karena setelah ada Surat Keputusan dari Presiden, langsung bisa dilantik. Tapi kalau di DPRD itu tidak. Di DPRD kalau akan melantik Anggota PAW harus lewat Paripurna,” imbuh Slamet. Pertemuan diakhiri dengan tukar cinderamata dan foto seluruh peserta pertemuan. (sf,zah)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR dan Pemerintah Sepakati APBN-P 2014

Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah menyepakati beberapa asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014. Sebelumnya, asumsi makro ini sudah dibahas oleh Pemerintah dengan Komisi XI DPR RI.

“Pertumbuhan ekonomi kita sepakat di angka 5,5 persen. Untuk inflasi, Pemerintah mengusulkan sebesar 5,3 persen, kita setuju. Ini yang diambil angka yang paling optimis,” jelas Ketua Banggar DPR RI Ahmadi Noor Supit di ruang rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Rabu (11/06) malam.

Selain itu, disepakati pula Tingkat Bunga SPN 3 Bulan sebesar 6,0 persen, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 11.600 per dolar AS.

“Nilai tukar ini berpengaruh terhadap subsidi. Pelemahan Rp 100 (pada nilai tukar terhadap dolar AS) itu sama dengan Rp 4 triliun. Gubernur BI memperkirakan, nilai tukar rupiah itu di kisaran Rp 11.600-Rp 11.800. Pemerintah mengusulkan Rp 11.700. Nilai tukar rupiah kita setuju Rp 11.600,” tambah Politisi Golkar ini.

Terkait dengan sumber daya energi,



Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit didampingi Wakil Ketua Banggar.

disepakati harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 105 US\$/barell. Untuk *lifting* minyak 818 ribu barell per hari, dan *lifting* gas 1224 ribu barell setara minyak per hari.

“Dengan demikian, kita sudah ada bahan, pedoman untuk membahas lebih jauh dalam panja,” imbuh Ahmadi.

Ditemui usai rapat, Anggota Banggar

Markus Nari menilai pemerintah belum yakin dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.

“Namun setelah kita lihat secara teknis, dan dibicarakan dengan Komisi XI, dari angka 5,1-5,5 sangat bisa. Kita harapkan, ini tidak menjadi beban pemerintah. Pemerintah harus bisa memikirkan ke depannya,” ujar Markus. (sf)/foto:odjie/parle/iw.



Kunjungan Spesifik Badan Legislasi DPR dengan Gubernur Provinsi Bali I Made Mangku Pastika, Kapolda Prov. Bali Albertus Julius Benny Mokalu dan unsur Muspida Provinsi Bali terkait Revisi UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Rabu (11/6) Foto: Nita Juwita/Parle/Hr.



Pertemuan Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR dengan Direktur Pengolahan dan GM Pertamina UP IV Cilacap, Jumat (30/5) Foto: Suciati/Parle/HR.



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah menyerahkan bantuan bencana gunung Sangeangapi kepada Bupati Bima Syafrudin HM Nur, dan berdialog dengan masyarakat setempat. Senin (9/6) Foto: Naefurodje/Parle/Hr.